

ANALISIS WACANA KEBIJAKAN : MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM DISKURSUS PUBLIK

Arik Prayoga, Dian Prima Safitri, Chaerey Ranba Sholeh
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Arik7401@gmail.com, dianprima2000@gmail.com, reyranba@umrah.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini memunculkan berbagai respons publik berupa dukungan maupun kritik terkait efektivitas program, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan tata kelola anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pemerintah membangun wacana kebijakan MBG serta menilai hubungan antara wacana pemerintah dan wacana publik dalam pembentukan legitimasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Discourse Network Analysis (DNA). Data diperoleh melalui studi dokumentasi yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah, pernyataan pejabat, pemberitaan media massa, artikel opini, dan publikasi lembaga terkait. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi aktor, argumen, dan posisi yang muncul dalam diskursus serta memetakan hubungan antaraktor dalam mendukung maupun mengkritik kebijakan MBG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah membangun wacana MBG sebagai investasi pembangunan manusia, upaya penanggulangan stunting, dan penggerak ekonomi lokal. Sementara itu, wacana publik berkembang dalam bentuk dukungan dan kritik yang berfokus pada keamanan pangan, efektivitas program, transparansi anggaran, serta ketepatan sasaran penerima manfaat. Interaksi antara kedua wacana tersebut menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan MBG tidak hanya dibentuk oleh narasi pemerintah, tetapi juga oleh respons publik yang berkembang di ruang diskursus. Pemerintah merespons berbagai kritik melalui penguatan pengawasan, evaluasi program, dan perbaikan standar pelaksanaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan dan legitimasi kebijakan MBG sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah membangun komunikasi yang responsif terhadap dinamika wacana publik.

Kata Kunci: Makan Bergizi Gratis, Analisis Wacana Kebijakan, Discourse Network Analysis.

ABSTRACT

The Free Nutritious Meals (MBG) policy is one of the Indonesian government's priority programs aimed at improving the nutritional quality of the population and supporting human resource development. In its implementation, this policy has elicited various public responses, ranging from support to criticism regarding the program's effectiveness, targeting accuracy, food safety, and budget management. This study aims to understand how the government constructs the MBG policy discourse and to assess the relationship between government discourse and public discourse in the formation of policy legitimacy. The study employs a qualitative approach using the Discourse Network Analysis (DNA) method. Data were collected through a documentary analysis of official government documents, statements by officials, mass media reports, opinion pieces, and publications from relevant institutions. The analysis was conducted by identifying the actors, arguments, and positions that emerged in the discourse and mapping the relationships among actors in supporting or criticizing the MBG policy. The results show that the government constructs the MBG discourse as an investment in human development, an effort to combat stunting, and a driver of the local economy. Meanwhile, public discourse has evolved in the form of both support and criticism, focusing on food safety, program effectiveness, budget transparency, and the accuracy of beneficiary targeting. The interaction between these two discourses indicates that the legitimacy of the MBG policy is shaped not only by the government's narrative but also by the public responses

emerging within the discursive space. The government has addressed various criticisms by strengthening oversight, evaluating the program, and improving implementation standards. This study concludes that the sustainability and legitimacy of the MBG policy are significantly influenced by the government's ability to establish communication that is responsive to the dynamics of public discourse.

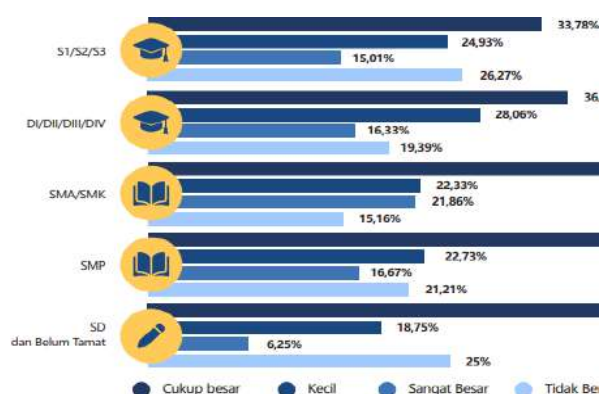
Keywords: Free Nutritious Meals, Policy Discourse Analysis, Discourse Network Analysis.

PENDAHULUAN

Penelitian ini melihat kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada kelompok sasaran terutama anak usia sekolah dan kelompok rentan seperti ibu hamil sebagai upaya intervensi gizi demi menurunkan angka kekurangan gizi dan stunting serta mendukung tumbuh-kembang dan prestasi pendidikan. Secara konseptual MBG menggabungkan dimensi kesehatan publik seperti pemberian nutrisi yang cukup, pendidikan dalam peningkatan konsentrasi dan prestasi siswa melalui pemenuhan kebutuhan gizi, serta ekonomi lokal yang dapat mendukung rantai pasok lokal petani, UMKM dan dapur komunal.

Pemerintah mengklaim bahwa hingga awal Oktober 2025 program MBG telah menjangkau 22 sekitar 1,3 juta ibu hamil, ibu menyusui dan balita (Prameswari Budiyan, 2025). kelompok kunci dalam periode 1.000 HPK yang menjadi sasaran utama upaya pencegahan stunting. Namun, cakupan tersebut masih 23 sangat terbatas pada kalangan siswa (sekitar 3,1% dari total 41,6 juta siswa) (Setuningsih & Dirgantara, 2025).

Gambar 1.1 Asumsi MBG Bisa Mencegah Stunting Berdasarkan Tingkat Pendidikan

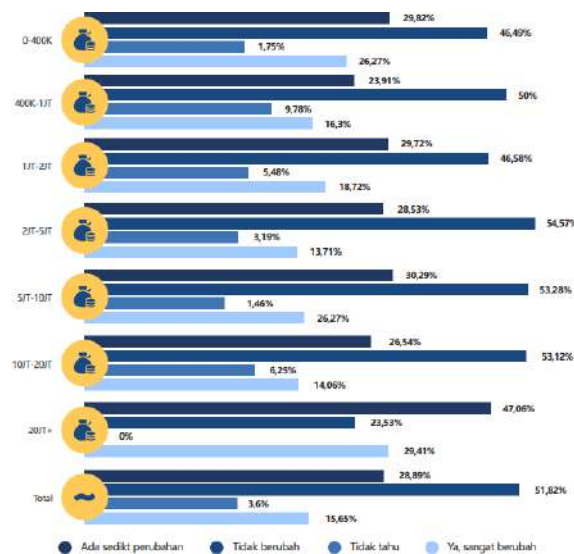


Sumber: Survei CELIOS
(Wahyudi Askar et al., 2025)

Dalam pandangan ini, MBG dinilai kehilangan arah sebagai intervensi sosial yang tepat sasaran, karena justru berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan menurunkan efektivitas kebijakan. Kritik ini menyoroti kesadaran kelas menengah dan berpendidikan tinggi terhadap pentingnya targeted policy, di mana bantuan publik diberikan secara selektif agar benar-benar berdampak pada penurunan stunting, bukan sekadar menciptakan kesan pemerataan semu.

Keberhasilan program pemberian makanan gratis di sekolah dapat dilihat dari bagaimana program ini mendukung perkembangan anak secara menyeluruh, mencakup tidak hanya perbaikan status gizi, tetapi juga peningkatan kesiapan belajar serta pembentukan perilaku 34 positif anak di sekolah, seperti keaktifan, tingkat fokus dan rajin (Xhonneux et al., 2022). Studi ini menemukan bahwa 51,86% responden menilai tidak ada perubahan tingkat keaktifan dan fokus anak di sekolah setelah menerima MBG. Di lain sisi, sekitar 29% responden melihat ada sedikit perubahan pada anaknya. Sedangkan, hanya 16% responden menyatakan bahwa anaknya menjadi lebih aktif dan fokus.

Gambar 1. 2 MBG dan Persepsi Orang Tua Bahwa Anak Lebih Fokus dan Aktif Di Sekolah



Sumber: Survei CELIOS
(Wahyudi Askar et al., 2025)

Sejak peluncuran MBG pada awal 2025, sejumlah kejadian dugaan keracunan makanan di sekolah dilaporkan di berbagai daerah. Gejala yang dilaporkan sebagian besar bersifat akut (mual, muntah, diare, pusing) dan kasus-kasus awal (Januari - Juni 2025) umumnya diidentifikasi sebagai akibat pengolahan yang tidak sempurna (mis. daging/ayam kurang matang), penyimpanan/delivery yang buruk, atau masalah tata kelola dapur mitra. Kasus-kasus ini memicu kekhawatiran publik terhadap keamanan pangan MBG dan menuntut peningkatan pengawasan mutu pada rantai penyediaan makanan.

Tabel 1.1 Kasus-kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (Januari-Juni 2025) ringkasan terverifikasi dari laporan media & BGN

Tanggal (2025)	Lokasi (provisi)	Tempat / subjek	Jumlah korban (laporan media)
16 Jan 2025	Sukoharjo, Jateng	SDN Dukuh 03	40 siswa (mual, muntah, pusing) (Jateng, 2025)

19–22 Feb 2025	Pandeglang, Banten	SDN Alaswangi 2	28–40 siswa (mual, diare, muntah)(Katadata.co.id, 2025)
18 Feb 2025	Waingapu, Sumba Timur	SD Katolik Waingapu	29 siswa (mual, keluhan rasa makanan basi) (Katadata.co.id, 2025)
18 Apr 2025	Batang, Jateng	SDN Proyonganggan 5	60 siswa (mual, sakit perut) (Katadata.co.id, 2025)
21–22 Apr 2025	Cianjur, Jabar	MAN 1 & SMP PGRI 1	Kombinasi: 23 siswa SMP + 55 siswa MAN (total ~78) dilaporkan (BGN, 2025)

Sumber : Olahan Data Penelitian 2025

Berdasarkan data di atas menunjukkan pada awal Januari sampai Juni 2025 terdapat banyak sekali kasus keracunan yang terjadi pada anak-anak sekolah bahwa dari permasalahan tersebut memunculkan adanya kritikan dari masyarakat terutama orang tua, guru, dan masyarakat lokal di sekitar sekolah menunjukkan rasa kecewa, khawatir, dan kehilangan kepercayaan pada pelaksanaan program MBG.

Respon pemerintah terhadap berbagai reaksi masyarakat atas insiden keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan pola komunikasi ganda: di satu sisi berupaya menenangkan publik dengan janji tanggung jawab dan perbaikan sistem, di sisi lain menegaskan keberlanjutan program sebagai prioritas nasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang mengintegrasikan teori sistem kebijakan dengan analisis wacana empiris terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam konteks diskursus publik Indonesia. Selama ini, kajian terhadap MBG masih

terbatas pada aspek implementatif, seperti efektivitas pelaksanaan, distribusi makanan, dan manajemen anggaran, sedangkan dimensi wacana kebijakan yang merepresentasikan bagaimana pemerintah, media, dan masyarakat membentuk serta memperdebatkan makna kebijakan tersebut belum banyak diteliti secara mendalam. Penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan mengamati bagaimana konstruksi narasi pemerintah tentang MBG berinteraksi dengan respon masyarakat dan wacana media dalam membentuk legitimasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Discourse Network Analysis (DNA) sebagai pendekatan kualitatif untuk menganalisis diskursus kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG). DNA dipilih karena mampu menggabungkan analisis wacana dan analisis jaringan sehingga tidak hanya mengidentifikasi isi argumen, tetapi juga memetakan hubungan antaraktor seperti pemerintah, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap aktor dominan, pola dukungan dan penolakan, serta proses pembentukan legitimasi kebijakan MBG dalam ruang publik.

Objek penelitian berupa dokumen, teks, dan publikasi yang membahas kebijakan MBG, termasuk dokumen pemerintah, berita daring, artikel opini, laporan lembaga riset, dan publikasi digital lainnya. Seluruh data bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan secara daring sehingga lokasi penelitian bersifat nonfisik atau ruang virtual. Fokus penelitian diarahkan pada representasi kebijakan, aktor-aktor diskursif, strategi pembingkaihan (framing), narasi, serta konteks sosial-politik yang memengaruhi perkembangan wacana mengenai MBG.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, penelusuran media daring, kajian literatur, dan pengumpulan arsip digital pada periode Februari 2025–Februari 2026, yaitu fase awal

implementasi kebijakan MBG. Informan dipahami sebagai aktor diskursif yang suaranya terekam dalam dokumen dan media, meliputi aktor pemerintah, legislatif, non-negara, dan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah diskursus publik mengenai kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berkembang di ruang publik Indonesia. Penelitian berfokus pada bagaimana kebijakan MBG dikonstruksikan, dibingkai, dan diperdebatkan oleh berbagai aktor, seperti pemerintah, media massa, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat. MBG dipilih karena merupakan program prioritas nasional yang memiliki dimensi kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi lokal, sekaligus memunculkan berbagai bentuk dukungan, kritik, dan perdebatan dalam masyarakat.

Hasil Penelitian

Dinamika Diskursus Publik dalam Pelaksanaan Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Hasil analisis menunjukkan bahwa media massa tidak hanya berperan sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai aktor yang membentuk pemaknaan publik terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kompas.TV cenderung membingkai kebijakan MBG melalui perspektif evaluasi kebijakan dengan menyoroti efektivitas program, transparansi anggaran, dan kesiapan pelaksanaan di lapangan. Sementara itu, TV One lebih banyak menampilkan isu-isu yang berkaitan dengan tantangan implementasi, seperti kasus keracunan makanan, pengawasan kualitas makanan, dan kritik dari berbagai kelompok masyarakat.

Tahapan Pengolahan Data Discourse Network Analysis (DNA)

Penelitian ini data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumentasi tidak langsung dianalisis, melainkan terlebih dahulu

melalui beberapa tahapan pengolahan data menggunakan metode Discourse Network Analysis (DNA). Tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi aktor, argumen, serta hubungan yang terbentuk dalam diskursus kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui proses tersebut, data tekstual yang berasal dari berbagai sumber berita dan dokumen kebijakan diubah menjadi data yang terstruktur sehingga dapat dianalisis secara sistematis.

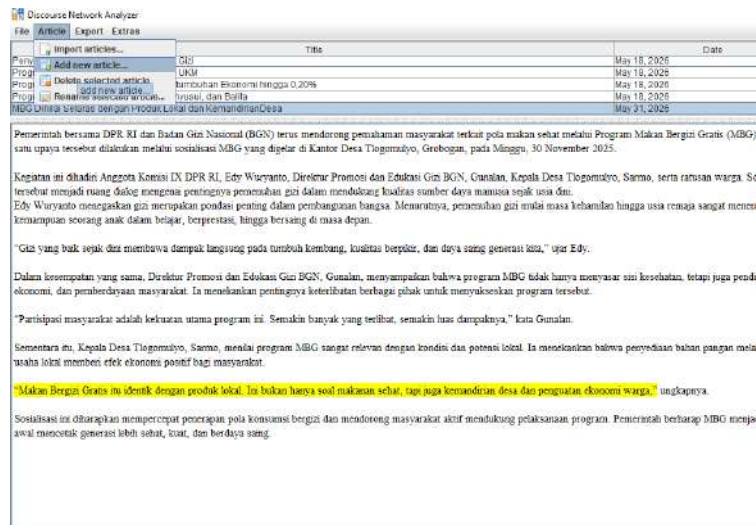
Gambar 4. 1 Pengumpulan dan Seleksi Data Berita



Sumber: Olahan Data
Peneliti, 2026

Pada tahap awal, peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi berita yang berkaitan dengan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari berbagai media massa yang telah ditentukan sebagai sumber data penelitian. Berita yang dipilih kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu diskursus publik, narasi pemerintah, serta respons berbagai aktor terhadap kebijakan MBG. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh data tekstual yang akan dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan Discourse Network Analysis (DNA).

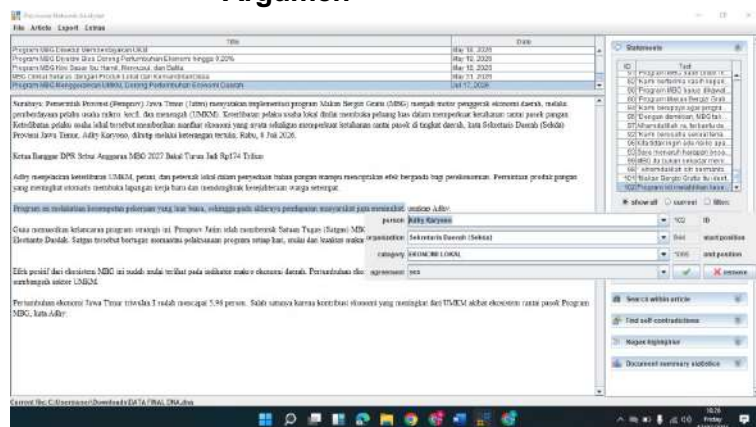
Gambar 4. 2 Input Data ke Dalam Perangkat Lunak DNA



Sumber: Olahan Data
Peneliti, 2026

Setelah data berita terkumpul, seluruh teks dimasukkan ke dalam perangkat lunak Discourse Network Analyzer (DNA). Pada tahap ini setiap artikel didokumentasikan dan disusun dalam basis data penelitian untuk memudahkan proses identifikasi aktor, pernyataan, dan argumen yang muncul dalam diskursus kebijakan MBG. Proses ini menjadi dasar untuk melakukan pengkodean (coding) terhadap setiap pernyataan yang ditemukan dalam dokumen.

Gambar 4. 3 Proses Coding Aktor dan Argumen

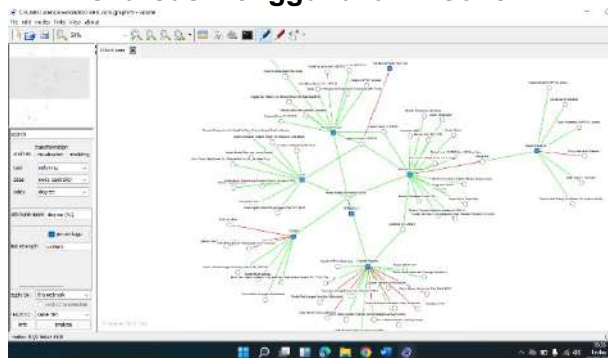


Sumber: Olahan Data
Peneliti, 2026

Tahap berikutnya adalah proses pengkodean (coding) terhadap setiap pernyataan yang terdapat dalam artikel. Peneliti mengidentifikasi aktor yang

menyampaikan pernyataan, organisasi yang diwakili, kategori argumen yang disampaikan, serta posisi aktor terhadap isu yang dibahas. Posisi tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori mendukung (agreement) atau tidak mendukung (disagreement).

Gambar 4. 4 Visualisasi Jaringan Diskursus Menggunakan Visone



Sumber: Olahan
Data Peneliti, 2026

Data yang telah melalui proses coding kemudian diekspor dan divisualisasikan menggunakan perangkat lunak Visone. Visualisasi ini menghasilkan jaringan diskursus yang memperlihatkan hubungan antara aktor dan argumen yang muncul dalam pembahasan kebijakan MBG. Garis berwarna hijau menunjukkan hubungan dukungan terhadap suatu argumen, sedangkan garis berwarna merah menunjukkan hubungan penolakan atau kritik. Melalui visualisasi ini, peneliti dapat mengidentifikasi aktor yang dominan, pola hubungan antaraktor, serta isu-isu utama yang membentuk diskursus publik mengenai kebijakan Makan Bergizi Gratis.

Visualisasi Jaringan Berdasarkan Aktor dan Konsep dalam Diskursus Program Makan Bergizi Gratis

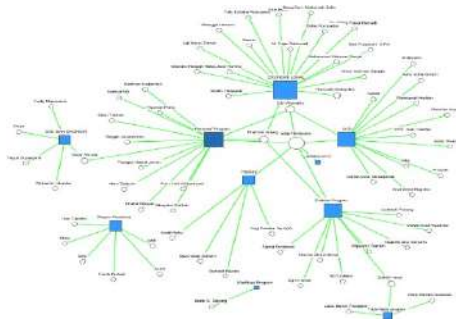
Visualisasi jaringan aktor dan konsep merupakan hasil analisis menggunakan metode Discourse Network Analysis (DNA) yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara individu-individu yang

terlibat dalam diskursus dengan isu atau konsep yang mereka sampaikan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jaringan ini dibentuk berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diperoleh dari sumber data penelitian, kemudian dikodekan ke dalam perangkat lunak DNA untuk melihat pola keterhubungan antara aktor dan konsep yang muncul dalam diskursus publik. Melalui visualisasi ini, dapat diketahui aktor yang paling aktif menyampaikan pendapat, konsep yang paling dominan dibahas, serta hubungan antara keduanya dalam membentuk wacana mengenai Program Makan Bergizi Gratis. Adapun hasil visualisasi jaringan diskursus pada penelitian ini ditampilkan pada Gambar 4.5 berikut

Gambar 4. 5 Person x Category Network Agreement

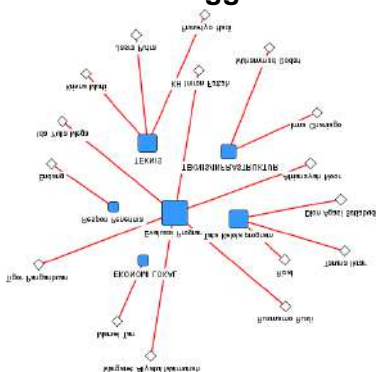
Sumber: Olahan
Data Peneliti, 2026

Gambar tersebut merupakan visualisasi hasil *Discourse Network Analysis* (DNA) yang memetakan hubungan antaraktor, isu, dan keterkaitan wacana dalam suatu kebijakan/program. Pada grafik ini, setiap lingkaran merepresentasikan aktor atau individu yang terlibat dalam diskursus, sedangkan kotak berwarna biru menunjukkan tema, isu, atau program utama yang menjadi pusat pembahasan, seperti Gizi, Apresiasi, Evaluasi Program, Teknis, Parsuasif Program, Ekonomi Lokal, dan Gizi dan Ekonomi.



Berdasarkan visualisasi ini, terlihat bahwa isu Gizi dan Persuasif Program menempati posisi sentral dengan tingkat konektivitas yang tinggi, menunjukkan bahwa kedua isu tersebut menjadi fokus utama dalam pembahasan serta melibatkan banyak aktor. Selain itu, beberapa aktor seperti Edy Wuryanto dan sejumlah tokoh lain tampak berperan sebagai penghubung antarsu, yang mengindikasikan posisi strategis mereka dalam membentuk dan menyebarkan narasi kebijakan. Selanjutnya ada penjelasan mengenai *Person x Category Network Disagreement* pada Gambar 4.6 berikut.

Gambar 4. 6 Person x Category Network Disagreement



Sumber:
 Olahan Data
 Peneliti, 2026

Gambar *Person x Category Network Disagreement* menunjukkan hasil visualisasi *Discourse Network Analysis* (DNA) yang menggambarkan pola keterhubungan antara aktor dengan sejumlah isu strategis dalam pembahasan program.

Berdasarkan visualisasi tersebut, terlihat bahwa isu Evaluasi Program menempati posisi yang paling dominan dalam jaringan karena memiliki tingkat konektivitas paling tinggi dibandingkan isu lainnya. Selanjutnya gabungan *Person x Category Network*

Combined pada kedua jaringan tersebut pada gambar 4.7

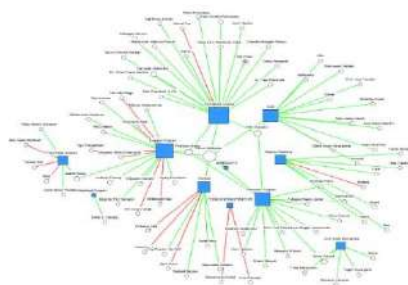
Gambar 4. 7 Person x Category Network Combined

Sumber: Olahan
 Data Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil analisis, isu Ekonomi Lokal, Gizi, Evaluasi Program, Persuasif Program, dan Teknis menempati posisi sentral dalam jaringan diskursus. Tingginya jumlah koneksi pada isu-isu tersebut menunjukkan bahwa tema-tema tersebut menjadi fokus utama pembahasan serta melibatkan banyak aktor dalam proses diskursus. Isu Ekonomi Lokal dan Gizi tampak memiliki dominasi relasi positif, yang menunjukkan bahwa mayoritas aktor memberikan dukungan terhadap penguatan kedua aspek tersebut sebagai bagian penting dalam implementasi program.

Visualisasi Jaringan Hubungan Organisasi terhadap Kategori Isu dalam Jaringan Diskursus

Visualisasi jaringan organisasi terhadap kategori isu merupakan hasil analisis *Discourse Network Analysis* (DNA) yang digunakan untuk memetakan keterhubungan antara berbagai organisasi atau lembaga dengan isu-isu utama yang berkembang dalam diskursus program. Melalui visualisasi ini, dapat diidentifikasi organisasi-organisasi yang memiliki keterlibatan dominan dalam isu tertentu, sekaligus menggambarkan pola interaksi dan distribusi perhatian



Lokal tampak sebagai isu yang paling dominan, ditunjukkan oleh banyaknya organisasi yang terhubung secara positif. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi lokal menjadi perhatian utama berbagai lembaga dalam mendukung keberhasilan implementasi program.

Aktor Dominan Dan Organisasi Dominan dalam Jaringan Diskursus

Berdasarkan hasil visualisasi jaringan aktor dan konsep, terlihat bahwa tidak seluruh aktor memiliki tingkat keterhubungan yang sama terhadap konsep-konsep yang muncul dalam diskursus Program Makan Bergizi Gratis. Beberapa aktor menempati posisi yang lebih sentral karena memiliki frekuensi pernyataan yang lebih tinggi dibandingkan aktor lainnya. Dalam jaringan ini,

Tabel 4. 1 Aktor Dominan

NO.	ORANG	PERNYATAAN
1	Dadan Hindayana	10
2	Edy Wuryanto	3
3	Pramono Anung	3
4	Ansar Ahmad	2
5	Zulkifli Hasan	2

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2026

Dominasi aktor tertentu menunjukkan adanya konsentrasi produksi wacana pada beberapa individu yang memiliki otoritas dan akses terhadap ruang publik. Dalam perspektif Discourse Network Analysis, aktor yang memiliki keterhubungan tinggi dapat dipandang sebagai opinion leader yang berkontribusi dalam membangun legitimasi kebijakan serta mengarahkan fokus pembahasan publik terhadap isu-isu tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembentukan diskursus mengenai Program Makan Bergizi Gratis sangat dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh aktor kunci dalam kebijakan tersebut.

Tabel 4. 2 Organisasi Dominan

NO.	ORGANISASI	PERNYATAAN
-----	------------	------------

1	Kepala Badan Gizi Nasional	10
2	Anggota Komisi XI DPR RI	10
3	Ketua Komisi XI DPR RI	2
4	Governor Kepulauan Riau	2
5	Governor DKI Jakarta	2

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2026

Tingginya tingkat keterhubungan tersebut menunjukkan bahwa kedua institusi memiliki peran sentral dalam proses produksi dan penyebaran wacana mengenai Program Makan Bergizi Gratis. Sebagai lembaga yang secara langsung terlibat dalam perumusan, pelaksanaan, maupun pengawasan kebijakan, organisasi tersebut menjadi sumber utama informasi dan argumentasi yang berkembang di ruang publik.

Respon Pemerintah terhadap Diskursus Publik dalam Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Respon pemerintah terhadap kritik publik terlihat melalui berbagai pernyataan resmi yang disampaikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian terkait. Pemerintah mengakui adanya beberapa kelemahan dalam pelaksanaan program, terutama terkait kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah. Pengakuan tersebut diwujudkan melalui permintaan maaf kepada masyarakat, pemberian penanganan medis kepada korban, serta komitmen untuk memperkuat pengawasan mutu pangan dan tata kelola distribusi makanan.

Pembahasan

Diskursus Publik dalam Kebijakan Makan Bergizi Gratis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan diskursus publik yang sangat dinamis dan melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, media massa, akademisi, organisasi masyarakat sipil,

hingga masyarakat umum. Dalam ruang publik, MBG tidak hanya dipahami sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan, tetapi juga sebagai kebijakan yang berkaitan, penggunaan anggaran negara, serta legitimasi politik pemerintah.

Respon Pemerintah terhadap Diskursus Publik Kebijakan MBG



Salah satu respons awal disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada 4 April 2025 melalui TV One. Menanggapi kasus keracunan yang terjadi di beberapa sekolah, Pramono menegaskan “MBG merupakan kebijakan pemerintah pusat dan kami sepenuhnya mendukung pelaksanaannya. Kehadiran kami di sini untuk memastikan anak-anak mendapatkan penanganan terbaik. Kami juga akan melakukan evaluasi agar ke depan pelaksanaan program ini semakin baik dan aman bagi seluruh peserta.”.



Pada tingkat nasional, pemerintah juga menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan program. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, pada 20 November 2025 TV One.

Menyatakan “Kami pastikan eksekusi program ini tetap terjaga, baik dari sisi anggaran maupun kualitas pelaksanaan,”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada

aspek pendanaan, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan program di lapangan.

Narasi serupa disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pada 3 Oktober 2025 TV One.

Ia menegaskan “Pemerintah terus memastikan MBG aman. MBG adalah hak seluruh warga negara agar menjadi generasi unggul. Sesuai instruksi Presiden, sistem dan tata kelola MBG akan diperbaiki secara menyeluruh.”.

Menurutnya, sesuai arahan Presiden, sistem dan tata kelola MBG akan terus diperbaiki secara menyeluruh. Kemudian pada 19 November 2025, Zulkifli Hasan kembali menegaskan. Oleh karena itu, pemerintah membentuk tim koordinasi khusus yang bertugas melakukan penyempurnaan pelaksanaan MBG secara berkelanjutan

Badan Gizi Nasional (BGN) berupaya membangun narasi bahwa setiap insiden harus menjadi bahan evaluasi tanpa mengurangi komitmen terhadap keberlanjutan program. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, pada 23 Oktober 2025 Kompas Tv.

menegaskan “Saya tidak bicara jumlah, karena sesuatu yang terjadi pada kesehatan tidak bisa distatistikan, namun apa pun, kami akan berusaha keras agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan”. Pernyataan tersebut



memperlihatkan upaya pemerintah untuk mengedepankan aspek kehati-

hatian dan pembelajaran institusional dalam merespons kritik publik. Komitmen evaluasi juga terlihat pada tingkat pelaksana teknis.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, pada 27 Oktober 2025 menyampaikan "Ya, tentu saja (kami berikan sanksi). Kalau untuk mitra yang mengalami kejadian kan langsung kami evaluasi, kita investigasi, kemudian kami setop operasionalnya sampai hasil evaluasi," Menurutnya, setiap mitra yang terlibat dalam insiden akan dievaluasi, diinvestigasi, dan dihentikan sementara operasionalnya sampai hasil evaluasi selesai dilakukan.



Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, pada 15 Agustus 2025 menyatakan "Program ini bukan sekadar pemberian makanan, tetapi investasi strategis dalam pembangunan SDM Indonesia.



Pemerintah juga berupaya melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan program. Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung, pada 10 Februari 2026 "Kami mohon bantuan masyarakat agar kami terus melakukan



perbaikan, serta bantu kami dalam bentuk pengawasan program di lapangan. Narasi ini menunjukkan adanya perubahan pendekatan pemerintah yang tidak lagi hanya menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra pengawasan dalam implementasi kebijakan. Dukungan terhadap penguatan tata kelola MBG juga datang dari DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta, menegaskan "Kebijakan tidak boleh berhenti di atas kertas. Kita harus memastikan program ini sampai ke masyarakat dengan kualitas yang terjaga. Penguatan lembaga dan peningkatan kapasitas SDM adalah kunci agar program ini berjalan efektif." Menurutnya, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program.

Berdasarkan berbagai pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa respons pemerintah terhadap diskursus publik mengenai MBG didominasi oleh narasi tanggung jawab, evaluasi, perbaikan tata kelola, dan penguatan legitimasi program.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah membangun wacana kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen strategis dalam penanggulangan stunting, peningkatan kualitas gizi masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan

rantai pasok pangan. Di sisi lain, publik membentuk wacana tandingan yang menyoroti aspek keamanan pangan, efektivitas program, transparansi anggaran, dan ketepatan sasaran. Interaksi antara wacana pemerintah dan wacana publik memperlihatkan bahwa legitimasi kebijakan MBG tidak bersifat statis, melainkan terus dinegosiasikan melalui proses diskursus di ruang publik. Oleh karena itu, keberlanjutan kebijakan MBG tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan implementasi program, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah merespons kritik dan membangun komunikasi yang adaptif serta partisipatif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik yang lebih terbuka, transparan, dan partisipatif dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Informasi mengenai tujuan, mekanisme, penggunaan anggaran, dan hasil evaluasi program perlu disampaikan secara jelas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan ruang dialog yang melibatkan masyarakat, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil, serta membangun narasi kebijakan yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, terutama ketika menghadapi kritik atau permasalahan dalam pelaksanaan program.

Pemerintah dan Badan Gizi Nasional juga perlu memperkuat pengawasan terhadap seluruh rantai distribusi makanan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pendistribusian kepada penerima manfaat, guna meminimalkan risiko keracunan makanan dan menjaga kualitas layanan. Penguatan standar operasional, pengawasan berkala, mekanisme pengaduan publik yang mudah diakses, serta publikasi perkembangan implementasi secara rutin menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas program. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti

kombinasi Discourse Network Analysis, analisis media digital, dan analisis sentimen publik di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Akromi, E. N. A. Al, & Santika, R. (2024). The Role of Language in Constructing Political Image on Social Media: A Critical Discourse Analysis. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(3). <https://doi.org/10.58344/JMI.V3I3.2259>
- Bayate, T. L., Delos Reyes, J., Payao, S. J., & Gildore, P. J. (2023). Discursive Representation of Teacher Identity in News Media Articles. *International Journal Corner of Educational Research*, 2(3), 120–132.
- Herningtyas, T., Azrianti, S., Fadjriani, L., & Dwi Yulisa, P. (2025). Efektivitas Program MBG (Makan Bergizi Gratis) pada Anak TK Darussalam Guna Peningkatkan Kualitas Belajar Mengajar di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Sidoarjo. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(10), 6520–6526. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i10.9027>
- Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2010). A narrative policy framework: Clear enough to be
- Sari, N. H., Lionardo, A., Thamrin, M. H., & Putra, R. (2025). Free School Meals Policy as a Learning Framework for MBG in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Eduvest – Journal of Universal Studies*, 5(10), 12939–12954. <https://doi.org/10.59188/EDUVEST.V5I10.52310>
- Suhaeni, C., Nissa, L., Mualifah, A., & Wijayanto, H. (2025). LDA Topic Modeling Analysis of Public Discourse on Indonesia's Free

- Nutritious Meals Program (MBG). *International Journal on Informatics for Development*, 14(1), 587–600. <https://doi.org/10.14421/ijid.2025.5211>
- van Hulst, M., Metze, T., Dewulf, A., de Vries, J., van Bommel, S., & van Ostaijen, M. (2025). Discourse, framing and narrative: three ways of doing critical, interpretive policy analysis. *Critical Policy Studies*, 19(1), 74–96. <https://doi.org/10.1080/19460171.2024.2326936>;ISSUE:ISSUE:DOI
- Luo, A. (2019). *Critical Discourse Analysis | Definition, Guide & Examples*. Published on August 23, 2019 Revised on June 22, 2023. https://www.scribbr.com/methodology/discourse-analysis/?utm_source
- Bhandari, P. (2020). *What Is Qualitative Research? | Methods & Examples*. Published on June 19, Revised on January 14. https://www.scribbr.com/methodology/qualitative-research/?utm_source
- Aderson. E James. (2015). *Public Policymaking, 8th Edition* - 9781285735283 - Cengage. <https://www.cengage.com/c/public-policymaking-8e-anderson/9781285735283/>
- Dunn .N Wiliam. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach - 6th Edition* - William. <https://www.routledge.com/Public-Policy-Analysis-An-Integrated-Approach/Dunn/p/book/9781138743847>
- Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy. *Understanding Public Policy*, 1–358.
- Fairclough Norman. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* – Norman Fairclough - GoogleBooks. <https://books.google.co.id/books?id=nf7cAAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Fischer, F. (2003). Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices. In *Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/019924264X.001.0001>
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge Selected Interviews and Other Writings*. <https://www.scrip.org/reference/referencespapers?referenceid=1674637>
- Hajer, M. A. (1997). The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process. In *The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process*. Oxford University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/019829333X.001.0001>
- Hajer, M. A. (2010). Authoritative Governance: Policy Making in the Age of Mediatization. *Authoritative Governance: Policy Making in the Age of Mediatization*, 9780199281671, 1–224. <https://doi.org/10.1093/ACPROF:OSO/9780199281671.001.0001>
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. In *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. https://books.google.com/books/about/Studying_Public_Policy.html?hl=id&id=eRytQgAACAAJ

Christina, B., & Teresia, A. (2025). *Indonesia urged to halt \$10 billion free school meals plan after mass food poisoning* | Reuters. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-urged-halt-10-billion-free-school-meals-plan-after-mass-food-poisoning-2025-09-22/?utm_source

Askar Wahyudi Media. (2025). *Mitigasi risiko program makan bergizi gratis.*

Amrin Ismadi. (2025a). Indonesia.go.id - Indonesia Bangun SDM Unggul dan Berdaya Saing melalui Program MBG. *Selasa, 12 Agustus 2025* . https://indonesia.go.id/kategori/sosial-budaya/9831/indonesia-bangun-sdm-unggul-dan-berdaya-saing-melalui-program-mbg?lang=1&utm_source

Setneg Republik Indonesia. (2025, August 15). *Program Makan BerGizi Gratis Sentuh 20 Juta Penerima, Ciptakan 290 Ribu Lapangan Kerja* | Sekretariat Negara. https://www.setneg.go.id/baca/index/program_makan_bergizi_gratis_sentuh_20_juta_penerima_ciptakan_290_ribu_lapangan_kerja?utm_source

Merlinda Atikah Ajeng, & Yusuf, Y. (2025). *Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Pendidikan.*

Stewart, L. (2025). *How to Conduct Document Analysis* . https://atlasti.com/research-hub/document-analysis?utm_source